

BaKTI Highlight Juli - September 2018

Festival Forum Kawasan Timur Indonesia VIII



Forum Kawasan Timur Indonesia kembali merayakan kemajuan pembangunan di Indonesia dengan menyelenggarakan Festival Forum Kawasan Timur Indonesia VIII. Pertemuan ini dikemas dalam bentuk Festival yang akan dihadiri sekitar 700 orang untuk berkontribusi ide, mimpi dan solusi pembangunan demi kemajuan di Kawasan Timur Indonesia dan tema Festival tahun ini adalah **“Lokal dan Berkelanjutan”**.

Festival Forum Kawasan Timur Indonesia merupakan wadah berbagi praktik cerdas, pengalaman, dan pembelajaran dari berbagai program-program pembangunan dari tingkat lokal untuk meningkatkan rasa kepemilikan, mengharmonisasi, serta memperbaiki pengelolaan program ke arah keberhasilan pembangunan nasional.

Lima praktik cerdas terpilih akan ditampilkan di Hotel Four Points Makassar, 24-25 Oktober 2018. Lima praktik cerdas tersebut adalah : Kalaodi, Kampung Ekologi Penjaga Tidore, Mengubah Minyak Jelantah Menjadi Biodiesel, PANADA (Portal Analisis Data Berbasis Peta di Kota Manado), Lakoat.Kujawas: Dari Pendidikan Karakter ke Kewirausahaan Sosial serta Data yang Mengubah Dunia – Sistem Administrasi dan Informasi Kampung dan Distrik di Papua dan Papua Barat.

Mengusung pendekatan kreatif guna mendorong interaksi yang lebih baik antar pelaku pembangunan, mengajak setiap peserta untuk menjalin hubungan harmonis dan saling mendukung antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mitra pembangunan internasional, sektor swasta, komunitas, akademisi, jurnalis, dan individu lainnya dengan berfokus pada aset yang dimiliki diri dan kelompok untuk dikembangkan secara positif dalam mendorong berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan sebagai bagian dari Indonesia yang berdaulat.

Rangkaian kegiatan dalam Festival Forum KTI VIII ini mencakup tiga program utama

Panggung Inspiratif

Menampilkan praktik-praktik cerdas dari berbagai daerah di kawasan timur Indonesia yang menginspirasi.

Galeri Informasi

Galeri informasi adalah pameran yang menampilkan kisah-kisah sukses hasil kerja berbagai badan pemerintah, mitra pembangunan internasional, LSM lokal, nasional, dan internasional, CSR sektor swasta, dan kelompok-kelompok masyarakat.

Side Events

Side events diadakan selepas konferensi untuk menambah wawasan terkait perbaikan pelayanan dasar, kesehatan dan pendidikan dengan partisipasi kampung di Papua, penggunaan sumber data baru untuk penyusunan kebijakan, inovasi peningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan di desa-desa sangat tertinggal melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan ekonomi desa, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dalam *Youth Showcase*, Reses Partisipatif, Dimensi Baru Kemitraan Organisasi Masyarakat Sipil dan Pemerintah, serta Mengembangkan Ekonomi Inklusif dan Kreatif.

Mari menjadi bagian penting perhelatan ini dengan mengkontribusikan ide, mimpi dan solusi pembangunan demi kemajuan di Kawasan Timur Indonesia.

Info registrasi <http://bit.ly/FestivalForumKTIVIII>

Kegiatan Pertukaran Pengetahuan

Events

Jumlah peserta yang hadir pada event yang dilaksanakan di kantor BaKTI untuk periode Juli-September 2018 adalah **362** orang terdiri dari **142** Laki-laki dan **220** perempuan dengan jumlah event sebanyak **12** event. Event-event ini dilaksanakan oleh BaKTI dan juga mitra BaKTI:

Seminar Pembangunan KTI dan Bantuan Pembangunan Australia

Konsulat-Jenderal Australia di Makassar bekerja sama dengan BaKTI memfasilitasi Seminar Pembangunan KTI dan Bantuan pembangunan Australia, bertempat di Kantor BaKTI Makassar (23/7). Kegiatan ini diadakan dalam rangka kunjungan Ibu Julie Hecksher, Direktur Jenderal Asia Tenggara di Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Seminar ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dalam mengelola program pembangunan yang didukung oleh Bantuan Pembangunan Australia dan dimoderatori oleh Bapak Richard Mathews, Konsul-Jenderal Australia di Makassar serta dihadiri oleh sejumlah program dan mitra-mitra antara lain KOMPAK, MAMPU, dan AIPJ 2.



Inspirasi BaKTI “Mengubah Menginspirasi – Cerita Tentang Perubahan”



Yayasan BaKTI menggelar event Inspirasi BaKTI berupa diskusi buku dari Program MAMPU-BaKTI berjudul 'Mengubah dan Menginspirasi - Cerita tentang Perubahan' (10/8). Buku ini berisi informasi mengenai perjalanan program, khususnya capaian-capaian di masyarakat dimana perempuan merupakan tokoh kunci dalam capaian-capaian tersebut. Diskusi buku ini bertujuan untuk berbagi informasi pengalaman perempuan agar menjadi cerita dan inspirasi bagi perempuan lain untuk membuat perubahan. Hadir sebagai narasumber adalah Alwy Rahman, Akademisi UNHAS dan Husaima Husain, Aktivistis Perempuan dengan moderator Luna Vidya. Beberapa catatan dari diskusi ini yakni buku ini menjadi jembatan untuk mengetahui hal-hal

lebih dalam dari sekedar catatan kehidupan orang-orang dan komunitas. Diskusi ini dihadiri oleh 68 peserta berasal dari pemerintah daerah, LSM/CSO, media, akademisi dan masyarakat umum.

Diskusi Sistem Zonasi pada Penerimaan Siswa Baru Provinsi Sulsel



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan melalui “RIMA 4in1” (Research, Innovation, Meeting, and Action Four in One) yang merupakan Forum Multi Stakeholder melaksanakan diskusi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi, di kantor BaKTI Makassar (20/8). Forum ini terdiri dari pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas yang bertujuan sebagai forum bersama dalam mencari solusi dan tindakan nyata dalam menyelesaikan tantangan masyarakat. Kegiatan ini diadakan untuk saling berbagi pengalaman dan menghimpun masukan dari stakeholder yang hadir dalam memberikan tawaran solusi terkait PPDB Sistem Zonasi khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Hadir sebagai narasumber adalah Irman Yasin Limpo (Kepala Diknas Prov Sulsel), Prof. Arismunandar, MPd (Pengamat Pendidikan), Muh Ramli Rahim (Ketua Ikatan Guru Indonesia), Herman Hafid Nessa,SH (Ketua Forum Orang Tua Siswa Kota Makassar), dan Nielma Palamba, SH, Map (Kadis Dukcapil Kota Makassar). Diskusi dihadiri sebanyak 60 peserta berasal dari Balitbangda kabupaten/kota, Bappeda, Kepala Sekolah, Guru, NGO dan orang tua siswa.

Workshop Peran CSO Dalam Pemanfaatan Dan Replikasi Pelayanan Publik



Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan TRANSFORMASI-GIZ dan didukung oleh program KOMPAK dan BaKTI menggelar workshop peran CSO (Civil Society organization) dalam memanfaatkan dan mereplikasi inovasi pelayanan publik dan pemanfaatan SP4N-LAPOR! (27/9). Output dari workshop ini adalah rumusan strategi CSO dalam mendorong kelompok dampingan untuk memanfaatkan LAPOR! serta rumusan strategi dalam mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti pengaduan publik. Hadir sebagai narasumber Ketua Ombudsman RI perwakilan Sulsel, Subhan Djoer, ST, MH dan dimoderatori oleh Ismu Iskandar. Ombudsman dalam SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) sebagai pengawas eksternal sesuai UU 37/2008 dan UU 25/2009 dan sejalan dengan target RPJMN 2015-2019 untuk mendorong pembentukan pengelolaan pengaduan internal di tiap penyelenggara pelayanan publik. SP4N sendiri menggunakan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai platform pengaduan. Pengaduan bisa dilakukan oleh masyarakat melalui kanal sms 1708 atau melalui website www.lapor.go.id. Workshop dihadiri oleh 20 peserta berasal dari Ombudsman, TRANSFORMASI-GIZ, Program KOMPAK dan sejumlah CSO di Sulawesi Selatan.

Information Help Desk

Selama periode Juli-September 2018, BaKTI melayani 33 **permintaan informasi**:

- Permintaan dari Komunitas Possible Hub bekerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk pelaksanaan pelatihan *softskill* bagi pemuda lulusan SMA/SMK yang masih menganggur di Kantor BaKTI
- Permintaan dari Bapelitbangda Kota Makassar untuk mendukung pelaksanaan Diskusi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi di Sulsel
- Permintaan dari IOM Makassar untuk wawancara *Data Use Assessment dan Political Economic Analysis* terkait Building Healthy Cities program (Smart City Kota Makassar)
- Permintaan dari TRANSFORMASI-GIZ untuk list CSO dan list media di Sulsel fokus pelayanan publik

Jika anda memiliki pertanyaan seperti informasi contact person, dokumen pembangunan KTI, event, atau program pembangunan KTI, silahkan email ke: info@bakti.or.id

Jaringan Pertukaran Pengetahuan

Selama bulan Juli – September 2018, jumlah pengunjung BaKTI adalah sebanyak 516 orang, yang terdiri atas pengunjung laki-laki 395 dan pengunjung perempuan sebanyak 121. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 380 adalah pengguna perpustakaan/galeri pengetahuan dan 136 berkunjung untuk mengakses internet. Jumlah buku 4.370. Dalam tiga bulan ini pula kami menerima publikasi sebanyak 48 exemplar (buku, buletin, brosur, CD, laporan dan modul) dari mitra BaKTI.

Total jumlah Sahabat BaKTI per September 2018 adalah sebanyak 1.885 anggota, dari jumlah tersebut anggota laki-laki sebanyak 1.072 dan anggota perempuan sebanyak 813. Anggota Sahabat BaKTI datang dari berbagai unsur seperti NGO, Mahasiswa, Swasta, Pelajar, Akademisi, media, pemerintah dan lainnya. **Mailing List** Sahabat BaKTI dimoderasi oleh BaKTI dan secara regular BaKTI membagikan informasi dan pengetahuan seperti beasiswa, peluang, artikel pembangunan, event-event menarik dan lowongan kerja bidang pembangunan selain itu anggota juga berbagi informasinya melalui milist ini. Informasi dari milist ini oleh beberapa Sahabat BaKTI kemudian menggunakannya untuk dijadikan kontent pada website yang mereka kelola. Sumber content dalam milis berasal dari organisasi/lembaga yang meminta informasinya disebarkan melalui media-media BaKTI, mengingat jangkauan dan sebaran Sahabat BaKTI yang signifikan.

Kegiatan Sahabat BaKTI

Pada rentan waktu Juli sampai dengan September 2018, perpustakaan BaKTI melakukan 3 kegiatan berupa :

1. Kelas Craft Anak “Membuat Boneka Gajah dari Sedotan Bekas”

Masih dengan tema *recycle*, Kak Meli dari *She and Him* mengajarkan adik-adik untuk memanfaatkan sedotan menjadi sebuah mainan lucu berbentuk gajah (31/8). Selain sedotan, anak-anak bisa memanfaatkan karton atau kertas sisa yang tak terpakai lagi. Anak-anak begitu antusias membuat mainan ini.



2. Kelas Sharing “Kelas Mendongeng”

Kelas Mendongeng diadakan pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 dengan narasumber Kang Bugi Sumirat, seorang pendongeng. Kelas ini dihadiri oleh 28 peserta dari berbagai latar belakang, 10 diantaranya laki-laki dan 18 merupakan perempuan. Dengan gayanya yang santai, Kang Bugi berbagi pengetahuan dan pengalamannya dalam mendongeng. Ada dua hal yang penting dalam mendongeng, yaitu alat peraga dan *mind mapping*.



3. Kelas Craft “Membuat Jam dari Kardus Bekas”

Kelas craft diadakan pada hari Jumat, 27 Juli 2018 dipandu oleh Meli, seorang crafter muda Makassar. Kelas dimulai jam empat sore dengan jumlah peserta sebanyak 15, 9 orang merupakan perempuan dan 6 orang merupakan laki-laki.



Berikut testimoni salah satu pengunjung Perpustakaan BaKTI:

“Pertama kali datang ke BaKTI sekitar 2 tahun yang lalu, saya belum pernah mendapatkan perpustakaan yang menyenangkan ini. Selain bisa membaca buku, kita juga bisa mengakses internet dan kita bisa berbagi, belajar dan mendapatkan banyak pengalaman dari teman-teman yang datang ke perpustakaan BaKTI.”

*Lulu Dahlan.
Mahasiswi*

Jika anda memiliki materi publikasi yang dapat mendukung BaKTI dalam meningkatkan pertukaran pengetahuan yang ingin didisplay di perpustakaan kami, silahkan kirimkan ke alamat berikut ini:

Yayasan BaKTI

Jl. H.A.Mappanyukki No. 32, Makassar 90125

Phone: + 62 411 832228/833383

Contact Person: Indina Isbach (Librarian)

Praktik Cerdas

• Pencarian Praktik Cerdas 2018

Setelah proses seleksi praktik cerdas dilakukan, telah terpilih lima praktik cerdas yang akan ditampilkan dalam Festival Forum Kawasan Timur Indonesia. Kelima praktik cerdas tersebut telah melalui proses verifikasi. Dokumentasi berupa film, tulisan dan foto juga telah selesai dilakukan yang prosesnya sendiri dimulai sejak pertengahan bulan Agustus lalu hingga dengan minggu ke dua September 2018.

Kelima praktik cerdas terpilih berasal dari provinsi Papua, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Praktik-praktik cerdas tersebut fokus pada sektor lingkungan, tata kelola pemerintahan, pemuda, kewirausahaan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun praktik cerdas yang terpilih adalah sebagai berikut

1. Data yang Mengubah Dunia – Sistem Administrasi dan Informasi Kampung dan Distrik di Papua dan Papua Barat
2. KALAO DI, Kampung Ekologi Pelindung Tidore (Maluku Utara)
3. PANADA - Portal Analisis Data Berbasis Peta (Sulawesi Utara)
4. Mengubah Minyak Jelantah Menjadi Biodiesel (Sulawesi Selatan)
5. Lakoat.Kujawas: Dari Pendidikan Karakter ke Kewirausahaan Sosial di Mollo Utara (Nusa Tenggara Timur)

• Update Praktik Cerdas

1. Malaria Center di Halmahera Selatan

Praktik cerdas Malaria Center di Halmahera Selatan direplikasi di 5 kabupaten di Papua. Lima kabupaten tersebut adalah Keerom, Sarmi, Mimika, Boven Digoel dan Kab. Jayapura. Kelima kabupaten ini dipilih karena merupakan wilayah endemis tertinggi malaria di Papua. Upaya replikasi oleh Pemerintah Papua ini bekerjasama dengan Unicef dan Kementerian Kesehatan. Unicef melakukan pendampingan pembentukan Malaria Center yang bersifat *technical assistance* salah satunya dengan menempatkan tenaga pendamping/konsultan malaria yang merupakan praktisi praktik cerdas Malaria Center di Halmahera Selatan.

2. Bumdes Pengelolaan Air Bersih di Lombok Timur

Pada tanggal 13 September 2018 praktisi Praktik Cerdas Bumdes Pengelolaan Air Bersih di Lombok Timur, Bapak Lalu Supratman diundang oleh Blue Forest ke Kabupaten Asmat, Papua. Bapak Lalu Supratman hadir untuk berbagi ilmu terkait pengelolaan air bersih dan sampah serta pemberdayaan ekonomi warga lewat Badan Usaha Milik Desa.

3. Bank Waktu di Adonara

Pada tanggal 28 September 2018 dilaksanakan Bursa Inovasi Desa 2018 di Kabupaten Flores Timur. Dalam event yang menghadirkan inovator-inovator desa ini sistem KTL (Kelompok Tani Lewowerang) atau yang disebut Bank Waktu masuk nominasi dan menjadi komitmen banyak desa untuk direplikasi dalam BUMDES Unit Simpan Pinjam Tenaga Kerja. Hal ini ditandai dengan banyaknya kepala desa dan BPD yang bertanda

tangan di kartu komitmen untuk direplikasi di desanya dan dimasukkan dalam RKPDes 2019. Ternyata menurut Bapak Kamilus Tupen- pegiat KTL- tulisan di majalah BaKTI News tentang KTL sangat mempengaruhi kepala desa.

Media pertukaran Pengetahuan

BaKTI News

BaKTI News adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI News adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Download BaKTI News Edisi 150 | Juli – Agustus pada link berikut

<http://bakti.or.id/bakti-news/baktinews-150-juli-agustus-2018>

Download BaKTI News Edisi 151 | Agustus - September pada link berikut

<http://bakti.or.id/bakti-news/baktinews-151-agustus-september-2018>

Download BaKTI News Edisi 152 | September – Oktober pada link berikut

<http://bakti.or.id/bakti-news/baktinews-152-setpember-oktober>

Anda dapat memilih edisi BaKTI News favorit Anda dan mengunduh versi elektroniknya di

<http://www.bakti.or.id/baktinews>

Untuk berlangganan BaKTI News, hubungi kami melalui email info@bakti.or.id

Baca artikel dan unduh referensi terbaru di batukarinfo.com

Artikel dan referensi terbaru dari program pembangunan di kawasan timur Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda sepanjang Juli - September antara lain adalah sebagai berikut.

Menjaga Pegunungan Tambrauw, Ini Cerita Dua Perempuan Tangguh asal Momo Kaa

Kaki-kaki lincah Mince Momo (40 tahun) dan Atafia Momo (22) menjejak masuk jauh ke dalam hutan. Berbekal keranjang anyaman buatan lokal yang tergantung di kepala, tak ada rasa takut saat menjelajah belantara. Bagi mereka hutan sudah seperti rumah kedua, tempat mengoleksi berbagai kebutuhan harian.

Mulai dari mencari sagu, berburu, memancing ikan, dan mencari aneka sayuran hingga tumbuh-tumbuhan obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit dapat dijumpai di dalam hutan adat marga Momo Kaa. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menjaga hutan.

Mince memiliki tiga orang anak, sedang Atafia 2 anak yang semuanya saat ini masih balita. Mereka tinggal di Kampung Ayapokiar, Distrik Miyah, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat di salah satu dari 19 unit rumah bantuan pemerintah.

<http://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/menjaga-pegunungan-tambrauw-ini-cerita-dua-perempuan-tangguh-asal-momo-kaa>

#CAUSINDY: A Platform for Australian and Indonesian Young Leaders to Create A Stronger Bilateral Relationship

Australia-Indonesia relations had begun since the 17th century, even before European settlement of Australia. Trading contact was established between indigenous communities in Northern Australia and Makassar traders for trepang, or a type of sea cucumber which was considered as a high-valued commodity. The bilateral relations have since emerged, growing, and formalised with Australia's full recognition of the independence of Indonesia in 1949. Today, the relations have continued to grow and flourished, encompassing a wide range of sectors from security, trade, culture, development, maritime, and so on.

"No two neighbours anywhere in the world are as comprehensively unlike as Australia and Indonesia," – Former Foreign Minister of Australia, Gareth Evans

<http://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/causindy-platform-australian-and-indonesian-young-leaders-create-stronger>

Pemda Papua dan WWF Indonesia Bangun Pusat Belajar Konservasi

TEMPO.CO, Sentani - Pemerintah Papua dan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia meresmikan Pusat Belajar Konservasi dan Ekologi di kompleks Kantor WWF Indonesia Program Papua, Kampung Sereh, Sentani, Papua.

"Masyarakat Papua perlu mendapat pengetahuan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan konservasi. Sehingga bisa menjaga kekayaan alam Papua dan mendapat manfaat yang besar bagi kemakmuran orang Papua sendiri," ujar Staf Ahli Gubernur Papua Ani Rumbiak, dalam keterangan tertulis, 8 Agustus 2018.

<http://www.batukarinfo.com/news/pemda-papua-dan-wwf-indonesia-bangun-pusat-belajar-konservasi>

Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Secara Partisipatif dan Responsif Gender



Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

<http://batukarinfo.com/referensi/panduan-penyusunan-peraturan-daerah-inisiatif-dprd-secara-partisipatif-dan-responsif>

Program yang Dikelola BaKTI

Program INSPIRASI

Memasuki minggu ke-3 bulan Juli hingga September 2018 di New Zealand, peserta program INSPIRASI (Indonesia Selandia Baru untuk Generasi Muda Inspiratif) memulai kegiatan pelatihan. Mereka mengikuti kelas Bahasa Inggris secara intensif selama 3 bulan di *International House di Auckland University of Technology*. Dikemas dalam kelas internasional, para peserta dapat memperkaya ketrampilan melalui interaksi dengan siswa-siswi dari berbagai negara.

Tidak hanya memperdalam kemampuan bahasa Inggris masing-masing, kelas ini juga memperdalam pengenalan budaya dari negara lain dan mengembangkan pemahaman budaya (*cultural understanding*). Bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai suku bangsa seperti Thailand, China, Korea, Perancis, Saudi Arabia dan Jordania dapat meningkatkan sikap toleransi mereka untuk menerima budaya lain yang berbeda. Para peserta juga diberikan kesempatan mengenal lebih dekat kebudayaan Selandia Baru melalui kelas Pengantar Budaya Selandia Baru. Berbagai informasi mulai dari sejarah negara Selandia Baru, penduduk asli dan kebudayaannya, sampai perkembangan modernisasi di Selandia Baru disajikan dalam kelas ini. Tak lupa mencicipi makanan dan minuman khas dari Selandia Baru dan mengikuti acara perayaan tahun baru suku Maori (Matariki).

Untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam program pembangunan berkelanjutan, mereka pun dilatih dalam kelas kepemimpinan dan penulisan akademik. Kelas ini mengasah keterampilan para peserta dalam kepemimpinan, berpikir kritis dan manajemen proyek. Melalui kelas ini setiap peserta dipersiapkan untuk membuat proyek berkelanjutan yang akan diaplikasikan di organisasi masing-masing. Setiap peserta pun difasilitasi dengan seorang mentor yang akan membantu dalam merencanakan proyeknya.

Para peserta ikut juga dalam diskusi bersama peneliti-peneliti perempuan di Universitas Auckland tentang '*Putting Women on the Pathway to Political Representation*', dan berpartisipasi dalam perayaan hari *Indigenous People* bersama Pacific Women Watch. Selain itu ikut berpartisipasi dalam Konferensi Perempuan International bertajuk '*Strenght in Diversity*' dengan pembicara utama Ibu Helen Clark, Mantan Perdana Menteri perempuan pertama Selandia Baru.



Program Kerjasama Unicef – BaKTI

Diseminasi Buku Panduan dan Buku Saku Reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum



Pada tanggal 24 Juli 2018, UNICEF melalui Yayasan BaKTI bersama instansi terkait melaksanakan kegiatan diseminasi buku panduan dan buku saku reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum. Buku Panduan dan Buku Saku Reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum (AKH) berbasis masyarakat yang telah disusun diharapkan memberikan gambaran dan menjadi acuan bagi masyarakat untuk melaksanakan proses reintegrasi sosial Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Buku panduan dan buku saku ini telah direvisi berdasarkan masukan dan rekomendasi hasil pendampingan reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum (AKH) di tingkat masyarakat. Pendampingan tahap I tahun 2017, jumlah anak yang didampingi sebanyak 5 orang dan tahap II, 2018, sebanyak 10 orang.

Kegiatan ini dihadiri oleh 83 orang, peserta berasal dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda, Lapas, Bapas, Dinas terkait lainnya, tokoh masyarakat atau tokoh pemuda dari beberapa kelurahan di Makassar dan Desa/kelurahan di Gowa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada isu anak yang berada di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Sasaran dari buku saku ini adalah masyarakat. Buku Panduan dan Buku Saku reintegrasi AKH berbasis masyarakat dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam melakukan upaya konkrit mempersiapkan anak untuk kembali ke keluarga dan masyarakatnya.

Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor PKSAI Kabupaten Gowa Tahap III

Saat ini terdapat 1.540 anak rentan dari data hasil penjangkauan yang dilakukan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Kabupaten Gowa pada tahun 2017 yang membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi. Jenis data kasus hasil penjangkauan adalah sebagai berikut; Akte kelahiran (386 anak), belum sekolah diusia sekolah (108 anak), putus sekolah (364 anak), sakit kronis (54 anak), disabilitas (127 anak), belum memiliki KIS (452 anak), terpapar Napza (30 anak) dan Miras (19 anak). Data hasil penjangkauan ini telah ditindaklanjuti oleh Tim PKSAI Gowa dan OPD terkait lainnya, tetapi kasus anak yang ditelaah dijangkau ini belum tertangani secara tuntas.

Untuk mendapatkan informasi sejauh mana respon dan dukungan dari berbagai pihak terkait data di atas, UNICEF bersama Yayasan BaKTI dan Pemerintah Kabupaten Gowa melaksanakan Pertemuan Koordinasi dan Monitoring Lintas Sektor tahap 3. Pertemuan ini diikuti oleh 25 orang peserta yang berasal dari Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Pendidikan, PMD, Dukcapil, RSUD, Dinas terkait lainnya dan Lembaga Pemerhati Anak kabupaten Gowa.

Pertemuan ini mendiskusikan strategi dan kebijakan tentang layanan bagi anak rentan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, akta kelahiran, rehabilitasi dan lainnya. Peserta mendiskusikan integrasi alur penanganan data kasus anak hasil penjangkauan. Data hasil penjangkauan yang didiskusikan antara lain, data anak disabilitas, sakit kronis, terpapar napza, korban kekerasan seksual dan anak yang bermasalah dokumen kependudukan atau akta kelahiran.

Pelatihan Pencatatan Kelahiran Online untuk Anak yang Baru Lahir di Kota Makassar



Dalam upaya mendukung pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan cakupan akte kelahiran, khususnya bagi anak yang baru lahir, maka Unicef melalui kerja sama dengan Yayasan BaKTI melaksanakan **Pelatihan Pencatatan Kelahiran Online melalui Aplikasi Mobile di Kota Makassar**. Pelatihan tersebut bertujuan untuk membekali kemampuan teknis bagi staf rumah sakit daerah, rumah sakit ibu dan anak (RSIA), dan puskesmas agar dapat langsung

mencatat kelahiran anak yang baru lahir melalui aplikasi online-baik melalui android maupun website, sehingga mempercepat penerbitan akte kelahiran.

Pelatihan pencatatan kelahiran anak yang baru lahir di Makassar, berlangsung pada tanggal 7-8 Agustus 2018 di Hotel Best Western Makassar dan telah memfasilitasi 56 peserta (21 Laki-laki, 35 perempuan) menggunakan aplikasi online Kucata'Ki untuk mencatat atau melaporkan data kelahiran anak yang baru lahir langsung ke dalam platform Dukcapil Makassar, <http://www.dukcapil-makassar.id> baik melalui android dan website. Mereka adalah petugas/staf penanggungjawab pencatatan kelahiran yang berasal dari 10 Puskesmas Perawatan, 11 RSIA, dan 6 Rumah Sakit Daerah dan Swasta di Kota Makassar.

Output dari kegiatan ini adalah:

- 56 peserta (21 Laki-laki; 35 perempuan) mampu mencatatkan/melaporkan data kelahiran anak yang baru lahir melalui aplikasi online Dukcapil. Selama pelatihan mereka mencatatkan data kelahiran anak yang dibawa serta dari tempat kerjanya di Puskesmas, RS, RSIA, dan RB.
- Segenap 27 titik pusat-pusat layanan yang meliputi 10 Puskesmas Perawatan, 11 RSIA, dan 6 Rumah Sakit Daerah dan swasta di Kota Makassar sudah memiliki username dukcapil dan password masing-masing yang sudah dipakai peserta selama pelatihan dan praktik mencatat/melaporkan data kelahiran.
- Rumusan agenda pendampingan teknis pencatatan kelahiran pasca pelatihan di RS, RSIA, Puskesmas, dan RB yang disepakati oleh segenap peserta dan fasilitator.
- Penggunaan aplikasi pencatatan kelahiran online Kucata'Ki di RS, RSIA, Puskesmas, dan RB diresmikan oleh Wali Kota Makassar.
- Kepala Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan dan pimpinan RS,RSIA, Puskesmas, dan RB menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagai dasar kemitraan mereka guna menjamin keberlanjutan pelaksanaan layanan pencatatan kelahiran online di pusat-pusat layanan tersebut.

Pertemuan Koordinasi Petugas Frontline PKSAI Kabupaten Gowa Tahap III

Untuk memperkuat mekanisme kerjasama PKSAI- Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif disemua level, Pemerintah Kabupaten Gowa didukung oleh UNICEF bersama Yayasan BaKTI telah melaksanakan Pertemuan Koordinasi *Frontliner* PKSAI tahap III pada tanggal 27-28 Agustus 2018. Pertemuan ini dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi PKSAI di tingkat kecamatan, memberikan penguatan dan peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial dan para pihak ditingkat kecamatan sehingga mengetahui alur pengaduan jika menemukan anak yang menghadapi masalah.

Melaui kegiatan ini teridentifikasi potensi sumber daya yang ada di kecamatan. Terdapat beberapa organisasi dan potensi sumberdaya manusia yang dapat membantu menyebarkan informasi terkait PKSAI dan mendeteksi dini anak-anak yang beresiko dan rentan yang ada di tingkat kecamatan. Tersusun rencana tindak lanjut dan strategi penyebaran informasi tentang PKSAI di tingkat kelurahan/desa dari masing-masing kecamatan.

Pertemuan Teknis Pencatatan, Pengumpulan Data Kelahiran dan Penerbitan Akte Kelahiran di Daerah Terjauh di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa



Guna mendukung percepatan pemberian akte kelahiran kepada anak rentan di wilayah yang sulit dijangkau di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, UNICEF melalui Yayasan BaKTI melaksanakan program penerbitan akte kelahiran yang terdiri dari tiga komponen kegiatan integral yang dilaksanakan secara sekuensial yakni: Pertemuan Teknis Pencatatan dan Pengumpulan Data Kelahiran Anak Rentan, Pengumpulan Data Kelahiran Anak Rentan, serta pencetakan akta kelahiran.

Secara umum output yang diharapkan kegiatan sekuens 1 tersebut di atas yakni terbangunnya mekanisme kerjasama yang berkelanjutan antara Dinas Dukcapil dengan organisasi atau lembaga di tingkat kelurahan yang bermitra dengan Dukcapil Kota Makassar dalam mempercepat pemberian akte kelahiran bagi anak yang rentan dari jangkauan pencatatan kelahiran dan administrasi kependudukan karena berada di wilayah yang jauh atau terisolir.

Pertemuan teknis pencatatan kelahiran anak yang rentan tanpa akte kelahiran dan tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan tersebut dilaksanakan di Makassar, 29 Agustus untuk Makassar dan 30 Agustus untuk Gowa. Diikuti oleh 24 peserta dari 21 kelurahan di empat kecamatan di Kota Makassar. Dari kabupaten Gowa sejumlah 24 orang yang berasal dari Penyuluh Lapangan Dinas KB sebagai jejaring Disdukcapil Gowa di tingkat desa/kelurahan yang terjauh. Segenap peserta sepakat untuk menjadi mitra Dukcapil untuk pencatatan kelahiran dan bersedia untuk terus melanjutkan kerjasamanya di masa yang akan datang. Terbangun pola relasi dan kemitraan antara Dinas Dukcapil dengan pemerintah kelurahan yang menjamin keberlanjutan pemberian layanan pencatatan/pelaporan kelahiran dari wilayah-wilayah yang terisolir (pulau, pemukiman urban dan daerah perbatasan) di Makassar, khususnya di empat kecamatan sasaran yakni Kec. Tallo, Mariso, Biringkanaya, dan Tamalate. Dan 5 kecamatan daratan tinggi di Kabupaten Gowa. Tersusun rencana penjangkauan, pengumpulan data

kelahiran, verifikasi data dan pencetakan akte kelahiran yang disepakati bersama segenap peserta dan Dinas Dukcapil, yang akan dilaksanakan dalam bulan September .

Pertemuan Koordinasi Petugas *Frontline* PKSAI Kota Makassar Tahap III



Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Kota Makassar ditujukan untuk memperkuat kesejahteraan dan perlindungan anak dalam situasi rentan dan beresiko dengan memadukan layanan kesejahteraan anak dan layanan dasar lainnya dalam satu sistem sehingga dapat memberikan layanan yang komprehensif, cepat, tepat, dan tuntas.

Untuk memperkuat mekanisme kerjasama PKSAI di semua level, Pemerintah Kota Makassar didukung oleh UNICEF bersama Yayasan BaKTI telah melaksanakan Pertemuan Koordinasi *Frontliner* PKSAI tahap III pada tanggal 3 dan 10 September 2018. Pertemuan ini dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi PKSAI di tingkat kecamatan, memberikan penguatan dan peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial dan para pihak ditingkat kecamatan sehingga mengetahui alur pengaduan jika menemukan anak yang menghadapi masalah.

Pertemuan koordinasi petugas frontline PKSAI Kota Makassar tahap III, diselenggarakan selama 2 kali. Tahap I diikuti oleh 42 peserta dari 8 kecamatan. Tahap II diikuti oleh 7 kecamatan terdiri 42 orang. Unsur peserta terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Ketua PKK Kecamatan, Ketua KUA, dan Majelis taklim.

Pelatihan Uji Modul Manajemen/Mengelola Konflik Bagi Pekerja Sosial

Draft modul manajemen konflik telah disusun sebagai acuan dalam memfasilitasi penyelesaian konflik di masyarakat. Penyusunan draft modul ini merupakan dukungan UNICEF melalui Yayasan BaKTI bersama Tim Penyusun. Tujuan penyusunan draft modul ini menjadi acuan dan bahan bacaan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pekerja sosial terkait mengelola konflik dalam proses layanan perlindungan kesejahteraan anak secara integratif.

Untuk menguji coba draft modul ini, UNICEF bersama Yayasan BaKTI telah mengadakan pelatihan manajemen/mengelola konflik bagi Pengelola Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Kota Makassar dan Kabupaten Gowa pada tanggal 13-14 September 2018. Penguatan ini difokuskan pada para pekerja sosial yang mendampingi langsung anak dan keluarga di tingkat masyarakat. Diharapkan draft modul ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pelatihan bagi para pekerja sosial untuk peningkatan keterampilannya dalam menghadapi konflik yang sering dihadapi dalam pekerjaannya. Pelatihan uji coba modul ini diikuti oleh 23 orang peserta.

Workshop Pendayagunaan Dana ZISWAF untuk Pembangunan Akses Air Bersih dan Sanitasi di Provinsi Sulawesi Selatan



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menandatangani nota kesepahaman dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tentang sinergi pendayagunaan harta wakaf, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk penyediaan layanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat khususnya warga yang tidak mampu. Bentuk kesepahaman tersebut dituangkan dalam fatwa MUI nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat.

Menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut, sejumlah kabupaten /kota di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan mengembangkan program pengadaan air dan sanitasi yang didanai dengan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang dikelola.

Sebagai upaya membuka ruang untuk berbagi pandangan, pengalaman, praktik-praktik baik serta membahas berbagai isu terkait peluang dan tantangan pendayagunaan dana ZISWAF sesuai fatwa MUI di atas, maka UNICEF melalui Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Tim Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Sulawesi Selatan melaksanakan Workshop Pendayagunaan Dana ZISWAF untuk Pembangunan Akses Air Bersih dan Sanitasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27-28 September di Makassar, diikuti

oleh 31 peserta dari unsur pimpinan Baznas dari 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, Bappeda Provinsi, Lembaga Amil Zakat independen (Dompet Duafa, Rumah Zakat, Inisiatif Zakat Indonesia) serta beberapa lembaga mitra Tim Pokja AMPL Provinsi Sulsel.

Hasil yang dicapai antara lain: 1. Komisioner Baznas dari 17 kabupaten/kota bertukar pengalaman dan praktik-praktik baik pemanfaatan dana ZISWAF dalam program bantuan akses air bersih dan sanitasi untuk masyarakat tidak mampu dari 8 asnaf penerima zakat (mustahik). 2. Teridentifikasi sejumlah program pendayagunaan dana ZISWAF yang dilaksanakan oleh sejumlah komisioner Baznas dan menjadi praktik baik untuk direplikasi oleh peserta workshop. 3. Segenap komisioner Baznas dari kabupaten/kota dan provinsi, LAZ independen, Bappeda Provinsi, Unicef, PPSP, dan USDP sepakat untuk melaksanakan aksi tindak lanjut antara lain melibatkan Baznas kabupaten/kota ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan akses air bersih dan sanitasi bersama dengan Tim Pokja AMPL kabupaten/kota.

Diharapkan lewat workshop berbagi pengalaman ini dapat mendukung berkembangnya inisiatif pendayagunaan dana ZISWAF untuk kelompok-kelompok mustahik, yang juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian target RPJMN 2015-2019 yakni akses air minum layak 100%, 0% kawasan kumuh, dan akses sanitasi layak 100% (yang dikenal dengan istilah Akses Universal 100-0-100) pada akhir tahun 2019.

Program Kerja Sama Knowledge Sector Initiative (KSI)-BaKTI

Penyediaan dukungan teknis pada pengembangan kompetensi analis kebijakan di tingkat sub nasional

Urgensi pengembangan penyusunan kebijakan publik di Indonesia sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, namun kesepahaman bagaimana menilai kualitas kebijakan, agenda, aspek atau unsur apa yang harus diperbaiki, siapa yang paling berkontribusi pada rendahnya kualitas kebijakan masih perlu dipertanyakan. Dengan kata lain, di Indonesia belum ada kesepakatan atau pemahaman yang sama mengenai seperti apa kebijakan yang baik. Dalam kondisi ini keberadaan analis kebijakan hadir untuk mengisi ruang perbaikan kebijakan publik di Indonesia. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) sebagai sebuah jabatan fungsional yang baru lahir pada tahun 2013 di dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan sebuah harapan baru bagi tumbuhnya atmosfer kebijakan publik di Indonesia yang lebih baik dan memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan publik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya didasari intuisi, opini, dan kepentingan sektoral para pengambil keputusan.

Sejak akhir 2017, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) menginisiasi penyusunan Standar Kompetensi Analis Kebijakan Indonesia (SKKNI) profesi analis kebijakan bagi masyarakat yang lebih luas termasuk akademisi, lembaga non-pemerintah, swasta, dll. Ke depannya, kompetensi analis kebijakan ini akan bersinggungan erat dengan berbagai kelompok masyarakat terutama ketika proses penyusunan kebijakan berlangsung baik di tingkat pusat maupun daerah.

Terkait dengan hal ini, KSI dan LAN bekerja sama dengan BaKTI yang dimulai bulan Juni sampai dengan Desember 2018 untuk mengembangkan kompetensi Analis Kebijakan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Aceh. Selain peningkatan kompetensi analisis kebijakan melalui program kerja sama ini diharapkan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai instrumen untuk menilai kualitas kebijakan dapat diperkenalkan pada instansi pemerintah di tingkat sub nasional. Kegiatan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan pengembangan kompetensi Analis Kebijakan dimulai pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2018.

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Daerah se-Aceh

Selama dua hari pelaksanaan di tanggal 19-20 September 2018, Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Pusat Analis Kebijakan – Lembaga Administrasi Negara (PUSAKA-LAN) dan Knowledge Sector Initiative (KSI) melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Kualitas Kebijakan, sebuah instrumen berbasis online yang sederhana, komprehensif, dan efektif digunakan untuk pemerintah daerah dapat menilai sendiri kualitas kebijakan publik yang telah mereka kembangkan dan implementasikan. Pemerintah Provinsi Aceh mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini, dimana BAPPEDA Aceh, dengan koordinasi bersama Sekretariat Daerah Aceh mengundang OPD terkait dari pemerintah kabupaten dan kota se-Aceh untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Bimtek tersebut.

Dalam kegiatan Sosialisasi, instruktur kegiatan dari PUSAKA-LAN mengemukakan latar belakang, konsepsi, tujuan, kegunaan, serta manfaat IKK bagi peningkatan kualitas kebijakan bagi pemerintah daerah; kabupaten dan kota se-Aceh. Selain itu, terkait pemberian bimbingan teknis, instruktur kegiatan bersama dengan BaKTI memberikan arahan dan simulasi mengenai operasionalisasi pengisian portal berbasis web IKK kepada peserta.

Sosialisasi IKK melibatkan OPD strategis yang erat kaitannya dengan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, yang diantaranya adalah Bidang Hukum, Badan Litbang, Bappeda, Bidang Organisasi, dan Dinas-Dinas lainnya terkait pelayanan dasar seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, selain daripada beberapa pejabat PKP2A LAN Aceh yang mengikuti kegiatan ini.

Dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan, Kepala Bappeda Aceh, Bpk. Azhari, SE, M.Si menekankan bahwa untuk menghasilkan dan menyukseskan pelaksanaan program strategis baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dengan berkualitas dan dapat menjawab secara efektif kebutuhan masyarakat sampai ke tingkat desa, perlu ditunjang dengan kebijakan daerah yang berasal dari hasil kajian yang komprehensif dan mempunyai dasar bukti yang kuat. Karena itu, dikarenakan kualitas kebijakan menjadi kebutuhan dewasa ini, keberadaan suatu sistem informasi untuk mendukung praktik-praktik *evidence-based* dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan menjadi tantangan yang patut dipenuhi. Indeks Kualitas Kebijakan dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan tersebut, untuk itu dibutuhkan komitmen dari

segenap perangkat pemerintah sampai di level kabupaten dan kota untuk dapat menggunakan perangkat yang dibangun oleh LAN dan KSI tersebut untuk membangun serta meningkatkan kualitas kebijakan masing-masing.



Program MAMPU

- Penandatanganan MoU SPPT-PKKT Prov Sultra, Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum dan penanganan hukum bagi korban kekerasan di Provinsi Sultra.
- Konsultasi Publik SDGs di Kota Parepare, bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pengisian Matriks RAD SDGs Kota Parepare
- Sosialisasi SDGs untuk Pemerintah dan Non Pemerintah terkait dengan Penyusunan Matriks SDGs Kota Kendari
- Konsultasi Publik SDGs di Kota Kendari, bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pengisian Matriks RAD SDGs Kota Kendari
- Kunjungan Anggota Parlemen Australia ke wilayah Program MAMPU-BaKTI. Tujuannya untuk melihat secara langsung pencapaian program MAMPU di wilayah Maros terutama terkait dengan Pemerintah dan DPRD.
- BaKTI menghadiri undangan dari MAMPU untuk ikut dalam kegiatan Dialog SDGs Program MAMPU di Jakarta, Tujuannya untuk mendapatkan masukan apa-apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan SDGs di wilayah MAMPU.
- Inspirasi BaKTI tentang Buku memperkuat Perempuan Untuk Keadilan dan Kesetaraan, Tujuannya untuk mengsosialisasikan buku yang sudah dihasilkan oleh program MAMPU-BaKTI
- Scooping Mission Tematik Perlindungan Sosial, Tujuan untuk mendapatkan masukan apa-apa saja perlindungan sosial yang sudah dilaksanakan oleh Sub-Mitra Yayasan BaKTI terkait dengan Perlindungan Sosial khususnya untuk lansia.

- Kunjungan Wakil Duta Besar Australia (Mr. Allaster Cox) ke Yayasan BaKTI, Tujuannya untuk mendengarkan Pencapaian Program MAMPU Yayasan BaKTI
- PPRG bagi SKPD Tana Toraja, Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas SKPD dalam menyusun anggaran yang responsif gender.



Sub Office BaKTI - Kabupaten Lombok Timur

- Pelatihan Paralegal, tujuannya untuk menguatkan kapasitas masyarakat lokal agar dapat memberikan pendampingan bagi korban kekerasan
- Pendataan Korban Gempa di Lombok Timur, Tujuan untuk menyusun Proposal Intervensi Rehab dan rekon akibat Gempa di Pulau Lombok
- Penyusunan Renstra Desa Kembang Kerang, tujuannya agar Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak yang sudah disusun dapat diimplementasikan ke dalam Renstra Desa.

Mitra Daerah (YKS-Tana Toraja, YLP2EM-Parepare, Arika Mahina – Kota Ambon, RPS – Kendari, PPSE – Belu)

- Pendampingan Kepada kelompok Konstituen di wilayah Ambon, Parepare, Tana Toraja, Kendari, Belu.
- Pelatihan Paralegal dilaksanakan di wilayah Ambon, Kendari, Tana Toraja, Belu dan Parepare, Tujuan tujuannya untuk menguatkan kapasitas masyarakat lokal agar dapat memberikan pendampingan bagi korban kekerasan
- Diskusi Kampung yang dilaksanakan di Belu dan Kota Parepare. Tujuannya untuk mendapatkan masukan terkait dengan persoalan perempuan dan anak di masing-masing wilayah.
- Advokasi Anggaran untuk P2TP2A Kota Parepare dilaksanakan oleh YLP2EM, tujuannya agar ada peningkatan alokasi anggaran untuk P2TP2A Kota Parepare.
- Lanjutan Diskusi Kampung di wilayah Parepare, Ambon, Kendari, Tana Toraja. Tujuannya untuk mendapatkan masukan terkait dengan persoalan perempuan dan anak di masing-masing wilayah.
- Advokasi Legislatif kepada Anggota Parlemen Parepare terkait dengan Komitmen Anggaran untuk P2TP2A Kota Parepare, Tujuannya agar ada peningkatan anggaran untuk P2TP2A Kota Parepare.
- Rapat Koordinasi terkait dengan Mekanisme Penanganan Korban Kekerasan di Wilayah Kendari dan Belu. Tujuannya untuk mendapatkan masukan terkait dengan mekanisme penanganan KtP dan KtA di Kota Kendari antara Pemerintah, Paralegal dan P2TP2A serta Kelompok Konstituen.
- Pelatihan PPRG bagi SKPD di Lingkup Pemda Tana Toraja, Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas SKPD dalam menyusun anggaran yang responsif gender.
- Diskusi Kampung, dilaksanakan di Kota Ambon dengan melibatkan Kelompok Konstituen, Arika Mahina dan Pemerintah Negeri/Desa. Tujuan untuk mendiskusikan persoalan yang terjadi pada perempuan dan anak dan akses ke dana desa
- Penyusunan Narasi SDGs Kota Parepare, tujuan agar draf SDGs yang sudah disusun segera dapat diajukan ke Walikota untuk di tandatangani.

- Rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Kendari, tujuannya untuk mengkoordinasikan penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.

Program KOMPAK - LANDASAN Fase II

Pada periode transisi program KOMPAK – LANDASAN Fase II di bulan Juli – September 2018, telah dilaksanakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam upaya mencapai tujuan akhir Program Landasan II di Papua dan Papua Barat. Diantaranya adalah:

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung Distrik Akat dan Atsj Kab. Asmat

Mendorong seluruh proses pembangunan Kampung diperlukan pemberdayaan masyarakat dengan melatih “Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK)” untuk membantu Aparat Kampung dan Bamuskam serta kelengkapan stuktur sosial pada tingkat kampung untuk bergerak secara partisipatif menentukan arah dan orientasi pembangunan Kampung.

Dalam konteks Kabupaten Asmat, secara khusus di Distrik Akat dan Atsj, kehadiran Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung merupakan momentum pelibatan peran masyarakat dalam proses pembangunan di kampung. Kader menjadi aset kampung yang berkontribusi dalam seluruh proses pembangunan di kampung, terutama dalam proses penyiapan data dasar kampung (SAIK) yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan kampung. Kader kampung juga nantinya akan membantu proses “tertib” administrasi kampung yang selama ini terbengkalai karena aparat pemerintahan kampung memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola data dan administrasi pemerintahan kampung.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 17 – 20 Juli 2018 dengan narasumber yang berasal dari Sekretaris DPMPK Kab Asmat, Pastor Vesto Maing, Pr, COMDEV Specialist Landasan dan Konsultan Fasilitator serta melibatkan 40 orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung distrik Akat dan distrik Atsj.

Pelatihan Pertanian Organik Distrik Akat Kabupaten Asmat

Belajar pada pengalaman Kejadian Luar Biasa (KLB) yang salah satu penyebabnya adalah minimnya konsumsi makanan bergizi, termasuk tidak tersedianya sayur-mayur yang memadai untuk dikonsumsi oleh ibu dan anak, LANDASAN mendorong para petani sayur di Distrik Akat untuk membuka kebun sayur. Hasil yang diharapkan, pertama-tama untuk konsumsi keluarga, guna memenuhi kebutuhan keluarga akan sayur. Selbihnya bisa untuk dipasarkan di kota Agats. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat akan sayur terpenuhi dan dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga dari hasil penjualan sayur. Selain itu pelatihan ini pertanian organik ini juga bertujuan untuk membentuk kelompok pertanian sayur organik di Distrik Akat dan

meningkatkan Pemahaman kelompok pertanian tentang pentingnya memelihara keseimbangan ekosistem melalui pertanian organik bagi petani sayur di Distrik Akat.

Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan bagi petani sayur organik ini, dilakukan selama 35 hari terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2018 s/d 24 September 2018 (35 hari) berupa teori dan praktek. Melibatkan 5 kelompok tani di kampung Distrik Akat (Waw Cesau, Ayam, Bayiw Pinam, Cumnew, Jowes) dan 1 kelompok dari guru SD dan SMP di pusat Distrik Akat. Total peserta pelatihan 19 orang Laki-laki dan 16 Perempuan. Dengan narasumber/pelatih Bruder Elias Logo OFM Ahli pertanian organik Fransiskan Papua.

Penguatan dan Pengembangan Fasilitator LANDASAN dan Tim Bupati Manokwari Selatan

Penguatan ini dilatarbelakangi oleh beberapa kendala dalam pengelolaan pembangunan di kabupaten yang telah diidentifikasi sebelumnya. Setelah tahap penguatan ini Tim LANDASAN akan bekerjasama mendampingi Bupati Manokwari Selatan dan SKPD terkait, agar memiliki kerangka berpikir yang sistemik dalam memahami isu-isu pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan.

Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari pada Tanggal 14-16 Agustus 2018 di Manokwari Provinsi Papua Barat. 12 staff tim KOMPAK - LANDASAN II mengikuti pelatihan penguatan kapasitas dalam memfasilitasi organisasi dan masyarakat dengan pendekatan STRIDE (Strategic Alignment in Development) dan difasilitasi oleh Principia Learning Lab.

Pendampingan Penyusunan SAID Distrik Momiwaren dan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan

Distrik sebagai Pusat Pengembangan Wilayah. Dengan terkoneksi data SAIK (Sistem Administrasi Informasi Kampung) ke SAID (Sistem Administrasi Informasi Distrik) Pemerintah Distrik dapat mengambil peran sebagai pusat pengembangan wilayah secara terintegrasi. Kampung, distrik dapat menkoordinir sekolah dan Puskesmas untuk melakukan berbagai program pembangunan dan perbaikan layanan dasar. Selain itu Pemerintah Distrik dapat melakukan fungsi asistensi untuk perbaikan kinerja aparatur pemerintahan kampung, mendorong kampung menemukan prioritas pembangunan berbasis data dan mendorong terjadinya kerjasama antar kampung.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus – 1 September 2018 di distrik oransbari dan 3 – 4 September 2018 di distrik Oransbari, Peserta distrik Momiwaren 28 orang dan distrik Oransbari 41 orang dengan narasumber yang berasal dari Lembaga Mitra Turatea.

Pelatihan Kepala Sekolah Dasar (Manajemen dan Leadership) Kabupaten Asmat

Kegiatan pelatihan ini bertujuan agar Pengawas dan kepala sekolah dapat memahami pengembangan kepemimpinan situasional, menerapkan kompetensi, tugas pokok dan fungsi kepala sekolah, serta dapat memahami dan menerapkan manajemen sekolah secara efektif.

Dilaksanakan di Kabupaten Asmat Tanggal 4 – 7 September 2018 di Hotel Sang Surya Asmat dengan jumlah Peserta 71 orang.

Pelatihan Pelaksanaan TUPOKSI Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM, Peraturan Kampung, Mekanisme Pengaduan Masyarakat serta Pelaporan Kampung di Distrik Akat dan Atsj, Kabupaten Asmat

Kegiatan ini merupakan upaya Program LANDASAN dalam memperkuat pemahaman Pemerintahan Kampung tentang pengelolaan sistem Pemerintah Kampung, tugas pokok Aparatur Kampung dan BAMUSKAM, serta kemampuan dalam menyusun peraturan kampung sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kampung dalam mengelola pemerintahannya dan juga sebagai proteksi bagi pelaksana Pemerintahan Kampung itu sendiri. Selain itu kegiatan juga Meningkatkan pemahaman yang terintegrasi tentang perencanaan dan penganggaran Reguler pada tingkat kampung. Pada periode ini kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 – 31 Agustus 2018 di 2 distrik Kabupaten Asmat, telah Diikuti oleh 69 orang yang terdiri dari aparat kampung dan BAMUSKAM dari 20 Kampung distrik Akat dan Atsj Kabupaten Asmat.

Pendampingan Penyusunan RUK Puskesmas Papua Barat

Dengan diakreditasinya layanan kesehatan dasar yaitu Puskesmas, layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, lebih berkualitas dan komprehensif. Salah satu indikator yang harus dipenuhi Puskesmas untuk mencapai tingkat akreditasi adalah adanya dan dilaksanakannya Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Terpadu. Program LANDASAN membantu mendampingi Puskesmas di wilayah kerja LANDASAN untuk menyusun dokumen rencana usulan kegiatan (RUK) Puskesmas 2019, diharapkan pendampingan ini akan menghasilkan dokumen Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas 2019 yang dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan bidang kesehatan.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 – 6 September 2018 dengan melibatkan staff dari 11 Puskesmas dampingan program dan Dinas Kesehatan 4 Kabupaten (Fakfak, Kaimana, Sorong dan Manokwari Selatan) serta narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Finalisasi modul Pendidikan, HIV AIDS dan Community Development

Untuk mendorong perubahan secara sistemik dan berorientasi pada penguatan masyarakat kampung, sekolah dan Puskesmas perlu diupayakan mengembangkan panduan-panduan pembelajaran yang lebih kontekstual dari sisi substansi dan metodologi. Panduan-panduan pembelajaran diantaranya adalah *standard operating procedures*, mekanisme, dan panduan teknis serta modul pelatihan dan pendampingan.

Finalisasi modul-modul Pendidikan dan HIV-AIDS yang telah digunakan atau dipraktikkan selama proses pelatihan oleh Program LANDASAN, dimaksudkan untuk menghasilkan modul yang dapat digunakan sesuai dengan konteks lokal Papua dan memenuhi kebutuhan penguatan kapasitas pengguna secara komprehensif dan integrative.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 – 31 Agustus 2018 dengan melibatkan narasumber yang berasal dari KEMENDIKBUD, Universitas, NGO, LPMP Papua, Pengawas Papua (1 orang), LPMP dan Papua Barat untuk modul pendidikan, sedangkan untuk modul HIV dan AIDS adalah Lilis Rumadaul (Direktur PKBI Papua), Yohana Tunya (aktivis NGO), dr Dian Guritno (Kepala Puskesmas Sentani, Trainer, Sri Rahayu (PKR Kota Jayapura, Trainer IMS), Lies Sitorus (LABKESDA Jayapura) dan Pungut Sunarto (Dinkes Kab. Jayapura, Trainer).

Penguatan dan Pengembangan Tim Bupati Manokwari Selatan

KOMPAK-LANDASAN II dengan mengacu pada metode STRIDE (Strategic Alignment in Development) mencoba membantu Bupati dan Tim memiliki kerangka berfikir yang sistemik dalam memahami isu-isu pembangunan di Manokwari Selatan, memahami keselarasan atau ketidakselarasan diantara komponen-komponen penting yang mempengaruhi capaian sasaran yang disepakati bersama dan Kabupaten bisa membuat rencana kerja strategi yang sistemik, didasarkan pada pemahaman yang kuat dan menyeluruh akan isu-isu yang ada di lapangan dan intersensi pembangunannya pun bisa lebih tepat sasaran.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dari proses wawancara 20 (Organisasi Perangkat Daerah) dan 2 Distrik di wilayah pemerintahan kabupaten Manokwari Selatan. Setelah melakukan proses wawancara, hasilnya dituangkan kedalam kerangka STRIDE yang kemudian dibahas pada Workshop Penguatan dan pelatihan penguatan kapasistas OPD dalam meng-fasilitasi organisasi dan masyarakat dengan pendekatan STRIDE.

Pelatihan Kepala Sekolah Dasar (Manajemen dan Leadership) Papua dan Papua Barat

Kegiatan pelatihan ini bertujuan agar Pengawas dan kepala sekolah dapat memahami pengembangan kepemimpinan situasional, menerapkan kompetensi, tugas pokok dan fungsi kepala sekolah, serta dapat memahami dan menerapkan manajemen sekolah secara efektif. Dilaksanakan di Jayapura untuk peserta dari Kabupaten Jayapura, Lanny Jaya, Waropen dan Nabire Tanggal 12 - 16 September 2018 di Hotel Grand Allison dengan jumlah Peserta 100 orang Dan untuk Papua Barat dilaksanakan di Hotel Royal Mamberamo Sorong diikuti oleh Kabupaten Sorong, Kaimana, Fakfak dan Manokwari Selatan pada tanggal 24 – 27 September 2018. dengan jumlah Peserta 99 orang.

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi untuk OPD Papua Barat

Kemampuan merencanakan dan menjalankan sistem monitoring dan evaluasi program, perlu dimiliki baik oleh pengelola langsung kegiatan-kegiatan di tingkat unit layanan, maupun Tim Teknis Kabupaten (OPD terkait) yang memiliki kewenangan mengsupervisi unit-unit layanan, yang juga merupakan pengelola program pada tingkat kabupaten, dan memiliki kepentingan serta tanggung jawab pencapaian tujuan program ini secara nasional. Guna melakukan proses perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang efektif, Program KOMPAK-LANDASAN Fase II melaksanakan pelatihan untuk memastikan kapasitas dan pemahaman Tim Teknis Kabupaten berada pada standar yang sesuai dengan kebutuhan untuk

mengimplementasikannya dalam program ini, maupun dalam program/tugas-tugas lainnya, melalui pelatihan khusus mengenai Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan ini diikuti oleh 32 orang dengan melibatkan 4 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Bappeda) kabupaten Fakfak, Kaimana, Sorong dan Manokwari Selatan.

Program Rintisan KIAT GURU

Pelaksanaan program KIAT Guru pada periode ini telah memenuhi target berdasarkan kerangka kerja hasil yang telah ditetapkan yakni dikaitkannya pembayaran tunjangan dengan kinerja dengan presentase 99% serta diberinya asistensi teknis kepada pemangku kepentingan tingkat daerah dengan jumlah 28 orang. Pada aspek manajemen program, rencana kerja nasional dan daerah sampai dengan Desember 2019 juga telah diselesaikan berbarengan dengan pelaksanaan penguatan Tim Nasional. Koordinasi dengan Kemendikbud Dirjen GTK sebagai mitra utama dalam pelaksanaan program KIAT Guru juga telah melibatkan pertemuan antara Deputi Bidang Dukungan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan teknis yang dihadiri oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan; Dirjen GTK dan Sekretaris Jenderal, Tim World Bank serta Tim Pelaksana Nasional KIAT Guru.

Pelaksanaan program KIAT Guru di 5 (lima) kabupten yang telah memasuki fase kemandirian sedang akan dilihat dan dipantau bersama oleh Tim KIAT Guru Daerah, Tim Koordinasi Daerah dan Tim Pelaksana Nasional KIAT Guru. Hal itu meliputi dikembangkannya instrumen pemantauan fase kemandirian dan digunakannya instrumen tersebut untuk memantau kegiatan di tingkat desa atau sekolah dalam 3 (tiga) periode yakni akhir Agustus, akhir September dan akhir Oktober. Dengan total sampling sekolah/desa yang dipantau sejumlah 45 sekolah, untuk periode akhir Agustus ini telah dilaksanakan pemantauan ke 18 sekolah. Dalam konteks kemandirian ini, telah dilaksanakan misi pemantaun bersama antara Tim Pelaksana Nasional KIAT Guru, Tim World Bank dan DFAT ke Sintang pada akhir September. Pada aspek lain, Tim Pelaksana Nasional juga telah mengidentifikasi tema-tema sekaligus media atau forum yang dapat digunakan untuk penyebarluasan pembelajaran pelaksanaan Program KIAT Guru. Salah satunya adalah dalam Festival Forum Kawasan Timur Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 Oktober 2018.

Kegiatan Tim KIAT Guru Nasional

- Rapat koordinasi dengan Dirjen GTK Kemendikbud telah dilakukan pada tanggal 12 September 2018. Pertemuan ini menghasilkan penegasan bahwa tunjangan guru dikaitkan dengan kinerja akan dilaksanakan pada tahun 2020.
- Rapat koordinasi antara Tim pelaksana Nasional dengan Tim Daerah Sintang pada tanggal 10 September 2018 dilakukan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan

kegiatan Misi Pemantauan Bersama yang akan dilakukan di Kabupaten Sintang pada akhir bulan September 2018. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan informasi, data dan fakta lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan Pertemuan Rutin Bulanan (PRB) yang dilakukan oleh sekolah dan KPL secara mandiri. Kegiatan ini juga bermaksud untuk mengetahui capaian, tantangan dan praktik baik dukungan pemangku kepentingan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dalam melaksanakan KIAT Guru Remote secara mandiri.

Update KIAT Guru di 5 Kabupaten wilayah kerja



Kegiatan KIAT Guru di kabupaten selama bulan Agustus sampai awal September 2018, berkontribusi pada 2 hal utama, yaitu; (1) melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan KIAT Guru fase mandiri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu kegiatan pemantauan bersama TKD ke sekolah dan desa, observasi uji petik yang dilakukan oleh pengawas, dan observasi PRB di sekolah terpilih, (2) Penguatan kapasitas perangkat Pemerintah Daerah antara lain dengan cara asistensi terhadap bidang PTK dan pengawas terkait penyusunan SOP uji petik dan verifikasi 3 bulanan, pengembangan instrumen monev bersama TKD, mendukung TKD dalam merumuskan indikator kemandirian pelaksanaan KIAT Guru oleh PEMDA, dan membantu TKD menyusun SOP penanganan keluhan dan pengaduan program KIAT Guru.

Monitoring Bersama TKD. Kegiatan monitoring ini merupakan kegiatan TKD Bersama dengan Tim KIAT Guru melakukan kunjungan ke sekolah untuk melihat kegiatan kemandirian sekolah dan desa. Kegiatan ini menindaklanjuti hasil pertemuan penyusunan indikator kepatuhan penilaian layanan guru. Menggunakan instrumen monitoring yang disusun oleh TKD, Tim Monitoring melakukan penilaian kemandirian di beberapa sekolah sasaran.

Observasi PRB. Kegiatan observasi dilakukan di beberapa sekolah sasaran. Kegiatan observasi ini melibatkan Tim KIAT Guru di Kabupaten dan BAPPEDA sebagai Tim TKD. Hasil Kegiatan ini adalah informasi, data dan fakta lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan PRB, dan Dokumen rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan PRB.

Fasilitasi penyusunan SOP pengaduan dan penanganan. Kegiatan ini adalah dalam rangka mengembangkan SOP pengaduan dan membentuk unit pengaduan. Hasil kegiatan ini adalah disepakati dan ditetapkannya dokumen standard operasional prosedur (SOP) tatakelola penanganan keluhan dan pengaduan KIAT Guru.

Program BANGGA Papua

Program BANGGA (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera), yang didukung oleh KOMPAK dan MAHKOTA, adalah program perlindungan sosial khas Provinsi Papua yang bertujuan meningkatkan gizi dan kesehatan anak Orang Asli Papua (OAP) yang berusia di bawah empat tahun. Dengan menggunakan dana otonomi khusus (otsus), Pemprov Papua akan memberikan dana untuk setiap anak sebesar Rp 200.000 per bulan.

Dukungan BaKTI terhadap Program BANGGA Papua adalah menghasilkan strategi komunikasi dan kelengkapannya serta meningkatkan kapasitas komunikasi Sekber (Sekretariat Bersama) di tingkat provinsi dan kabupaten. Kelengkapan strategi komunikasi yang menjadi mandat BaKTI antara lain mendesain materi-materi komunikasi dan memproduksi mock-upnya. Sementara peningkatan kapasitas komunikasi dilakukan dengan menyusun modul pelatihan ToT (Training of Trainer) komunikasi, melaksanakan ToT di tiga kabupaten uji coba (Asmat, Lanny Jaya dan Paniai), serta mendampingi sekber kabupaten dalam mengimplementasikan strategi komunikasi di tiap kabupaten.

Berikut adalah highlights beberapa kegiatan selama bulan Juli - September 2018:

Rapat Koordinasi BANGGA Papua

Tim BaKTI ambil bagian dalam rapat koordinasi (rakor) BANGGA Papua yang digelar di Hotel Horison, Timika. Dalam rapat koordinasi ini, tim BaKTI memaparkan draft strategi penanganan situasi khusus terkait penundaan pencairan dana yang telah terjadi, draft strategi komunikasi menjelang pencairan dana, laporan pelaksanaan ToT Komunikasi di provinsi dan kabupaten, materi-materi sosialisasi dan edukasi BANGGA Papua, serta rencana kegiatan komunikasi selanjutnya.

Dalam rakor tersebut, Sekber Provinsi menekankan pentingnya tindak lanjut untuk pelatihan pemantapan komunikasi (refreshing) untuk anggota Sekber Provinsi, karena mereka akan

segera mendampingi 7 (tujuh) kabupaten baru. Selain itu, pelatihan komunikasi tingkat lanjut untuk anggota sekber kabupaten juga penting untuk dilaksanakan.

Pendampingan/mentoring ke kabupaten

Sambil menunggu realisasi pelatihan-pelatihan tersebut, tim BaKTI terus melakukan pendampingan teknis ke kabupaten uji coba. Di bulan Agustus, tim BaKTI kembali melakukan pendampingan kepada Sekber Kabupaten Asmat. Pendampingan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terkait potensi situasi khusus menjelang waktu pencairan dana, serta hal lain yang dianggap perlu untuk didiskusikan.

Catatan penting dari pendampingan di Asmat adalah:

1. Cukup banyak praktik cerdas di Asmat, tetapi belum didokumentasikan secara baik.
2. Sekber Asmat meminta BaKTI melakukan peningkatan kapasitas anggota sekber dalam hal menuliskan dan mempublikasikan kegiatan dan praktik cerdas di Asmat.
3. Sekber Asmat meminta BaKTI memberikan bantuan teknis terkait penyediaan panduan atau pegangan untuk kepala kampung dan distrik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dan keluhan dari masyarakat.
4. Sekber Asmat juga meminta BaKTI membantu persiapan produksi film pendek tentang sosialisasi BANGGA Papua.

Tim BaKTI segera menindaklanjuti permintaan dari Sekber Asmat ini.

Konsultasi Rencana Kerja BaKTI kepada Sekber Provinsi

Memasuki bulan September 2018, tim BaKTI memulai kegiatan dengan pertemuan bersama tim Sekber Provinsi. Agenda utama pertemuan ini adalah untuk mengkonsultasikan rencana kerja tim BaKTI untuk periode Agustus – Oktober 2018, agar kegiatan komunikasi sejalan dengan kegiatan-kegiatan program lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Tim BaKTI berhasil mendapatkan komitmen Sekber Provinsi untuk menjadwalkan beberapa kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten. BaKTI juga berhasil mengkonsultasikan draft video promosi BANGGA Papua dan menerima banyak masukan dari Sekber Provinsi.

Dalam rakor selanjutnya yang dijadwalkan di awal atau pertengahan Oktober, BaKTI diminta untuk menyampaikan tentang kegiatan komunikasi kepada 7 (tujuh) kabupaten baru yang akan melaksanakan program BANGGA Papua. Setelahnya, BaKTI juga diminta untuk melanjutkan dengan pelatihan komunikasi tingkat lanjut dengan peserta dari 3 kabupaten uji coba.

Pelatihan Pemantapan (refreshing) tentang Komunikasi untuk Sekber Provinsi

Pelatihan ini diperuntukkan bagi anggota Sekber Provinsi yang telah mengikuti ToT Komunikasi akhir Maret lalu. Pelatihan ini dimaksudkan untuk agar anggota Sekber Provinsi lebih siap dalam melakukan sosialisasi tentang BANGGA Papua kepada 7 (tujuh) kabupaten baru dan dalam mendampingi kabupaten-kabupaten tersebut. Pelatihan digelar di Jayapura pada tanggal 13-14 September 2018.

Pendampingan kepada Sekber Paniai

Merespon permintaan Sekber Paniai, tim BaKTI bertemu dengan Sekber Paniai dan mendiskusikan tantangan-tantangan terkait komunikasi yang mungkin terjadi ketika verifikasi dana dan akibat penundaan pembayaran dana. Tim BaKTI mencoba mengidentifikasi pilihan-pilihan untuk jalan keluarnya. Pendampingan dilakukan pada tanggal 17 – 18 September 2018.

Monev Komunikasi di Asmat

Bersama dengan Sekber Asmat, tim BaKTI melakukan evaluasi tentang dua hal: pertama, keterampilan komunikasi anggota Sekber Asmat pasca ToT Komunikasi dan kedua, evaluasi materi-materi sosialisasi dan edukasi BANGGA Papua yang telah didesain oleh tim BaKTI. Monev dilakukan di Agats dengan menggunakan metode SWOT analysis.



Pelatihan Menulis di Asmat

Merespon permintaan Sekber Asmat, BaKTI melakukan pelatihan menulis bagi anggota sekber yang telah diseleksi oleh Sekber Asmat. Pelatihan dimaksudkan untuk mempersiapkan anggota sekber agar mampu mengidentifikasi topik-topik bernilai berita, mengemas informasi menjadi

tulisan atau artikel bernilai berita, dan memanfaatkan hubungan dengan media massa untuk mempromosikan dan mengedukasi masyarakat tentang program BANGGA Papua. Pelatihan dilakukan selama 2 (dua) hari di Agats dengan jumlah peserta 15 orang.

Monev bersama DFAT dan KOMPAK

Monev bersama ini dilakukan pada tanggal 21 – 23 September 2018. Sekber Provinsi dan BaKTI masing-masing mempersiapkan paparan untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan komunikasi yang telah dilakukan, praktik cerdas, tantangan-tantangan dan rencana kerja selanjutnya.

Pendampingan kepada Sekber Lanny Jaya

Tim BaKTI bertemu dengan Sekber Lanny Jaya ketika Sekber Provinsi melakukan monitoring ke kabupaten tersebut. Tim BaKTI mencoba mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Sekber Lanny Jaya dan kebutuhan-kebutuhan bantuan teknis. Pendampingan ini dilakukan pada tanggal 24 -25 September 2018.